



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# DUKUNGAN FISKAL BAGI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PUBLIK

Irfa Ampri, PhD



PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL



# ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2014



# ARAH KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2014



## Tema RKP 2014

MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG LEBIH BERKEADILAN

### 4 Pilar Pembangunan

*Pro Growth*

*Pro Job*

*Pro Poor*

*Pro Environment*

### Tema Kebijakan Fiskal

MEMPERKUAT PERTUMBUHAN EKONOMI  
YANG INKLUSIF, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN MELALUI PELAKSANAAN KEBIJAKAN FISKAL YANG  
SEHAT DAN EFektif

Strategi

MENYEDIAKAN STIMULASI FISKAL SECARA TERUKUR DENGAN TETAP MENJAGA  
KESINAMBUNGAN FISKAL



# Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal



**Substansi :** mendorong agar APBN lebih produktif (*productive*) untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dengan tetap menjaga keseimbangan (*balance*) dalam rangka memperkuat kapasitas dan daya tahan fiskal (*resilience*), namun tetap dikelola secara hati-hati (*prudent*)

1

Mengendalikan  
Defisit Anggaran

1,49% PDB



1. **Optimalisasi Pendapatan** dengan meningkatkan iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan;
2. **Meningkatkan kualitas belanja** melalui (i) peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur (ii) pengendalian subsidi, (iii) efisiensi belanja barang (operasional & perjalanan dinas).

2

Mengendalikan  
Keseimbangan  
Primer



1. **Optimalisasi Pendapatan** yang tidak dibagihasilkan dan *non earmarking*;
2. **Memperbaiki struktur belanja** melalui pembatasan belanja terikat, belanja mandatory, dan efisiensi subsidi untuk **kualitas belanja**.

3

Menurunkan ratio  
utang terhadap  
PDB



1. **Pengendalian pembiayaan yang bersumber dari pinjaman**;
2. ***Net negatif flow* (pinjaman luar negeri)**.
3. Mengarahkan pemanfaatan **pinjaman harus untuk kegiatan produktif** yang meningkatkan nilai tambah atau meningkatkan kapasitas perekonomian.



# Dukungan Belanja Negara



# Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 (1)

1. Peningkatan Kinerja K/L, melalui :
  - Penyesuaian gaji pokok aparatur negara untuk menghadapi laju inflasi
  - Melanjutkan pelaksanaan reformasi birokrasi di 14 K/L
  - Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja operasional K/L (perjalanan dinas, kegiatan seminar, konsinyering)
  - Perbaikan perencanaan anggaran di masing-masing K/L
2. **Peningkatan belanja infrastruktur untuk mendukung *domestic connectivity*, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan transportasi publik, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan;**
3. **Mendukung pendanaan hibah untuk pembangunan MRT dalam rangka memenuhi transportasi massal di Ibukota;**



# Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 (2)



4. Melanjutkan dan memperluas program perlindungan sosial pada masyarakat dan lingkungan, a.l. melalui PNPM, PKH, BSM, BOS, KUR
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan keterjangkauan bagi masyarakat
6. Pengembangan Kesehatan: (1) Pelaksanaan program SJSN alokasi untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sebesar Rp19.225 per orang per bulan untuk 86,4 juta jiwa; (2) peningkatkan kapasitas rumah sakit dan tenaga medis.
7. Mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista untuk mempercepat pembangunan kekuatan dasar minimum (Minimum Essential Forces/MEF), serta pengembangan industri pertahanan nasional



# Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2014 (3)



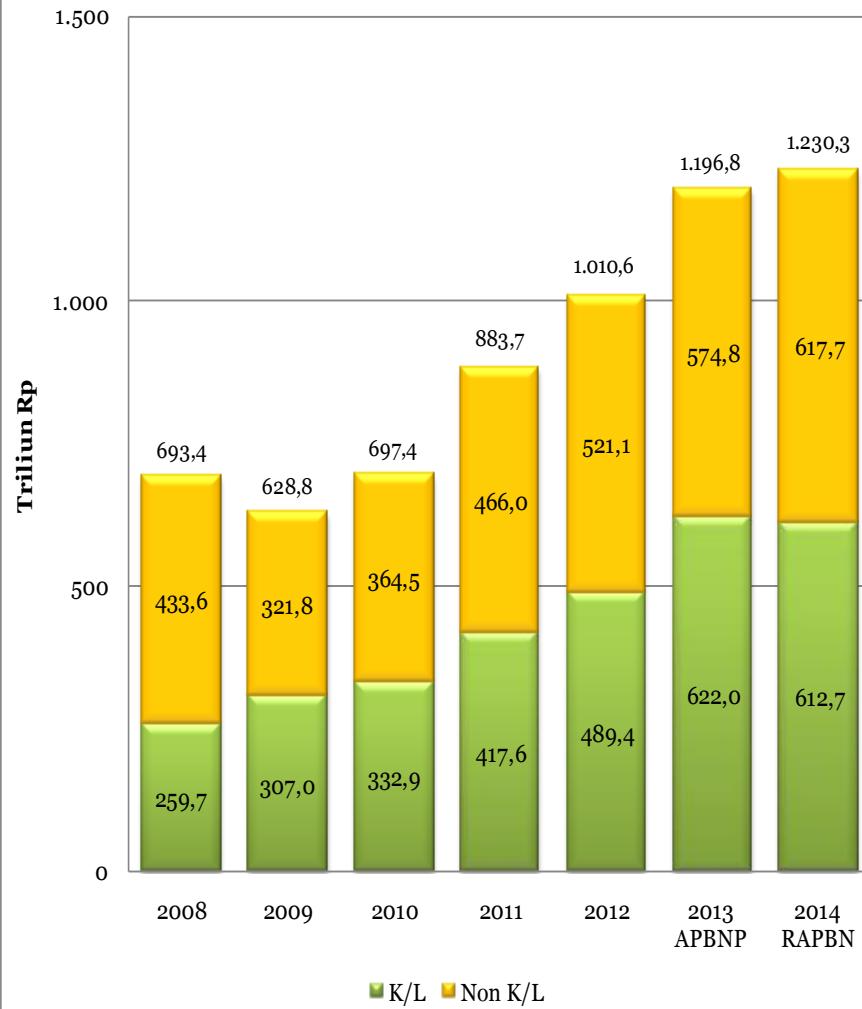
- 8. Menjaga pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang demokratis, lancar, dan aman untuk mempertahankan stabilitas nasional;
- 9. Penyusunan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga, mengurangi tingkat kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan;
- 10. Perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran K/L untuk meningkatkan kualitas belanja dan pencapaian sasaran pembangunan secara optimal;



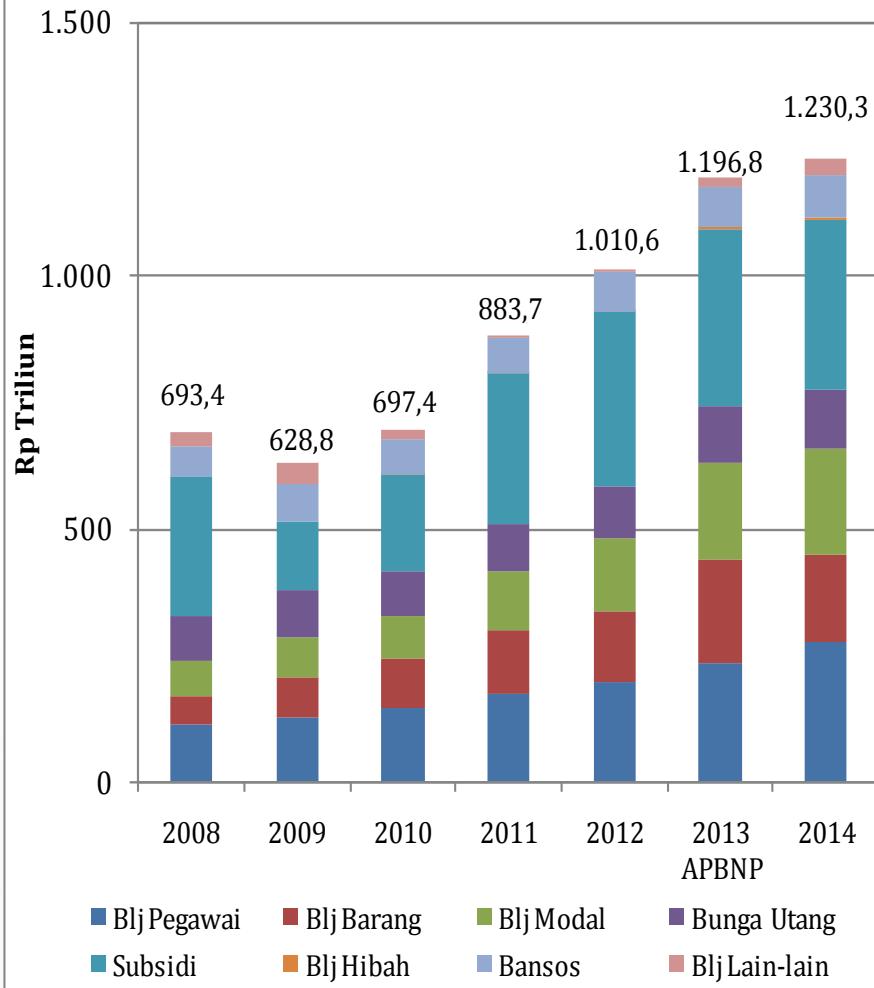
# Belanja Pemerintah Pusat Terus Mengalami Peningkatan Untuk mendukung Program Pembangunan



Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat (K/L dan Non K/L),  
2008-2014



Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat  
menurut Jenis, 2008-2014

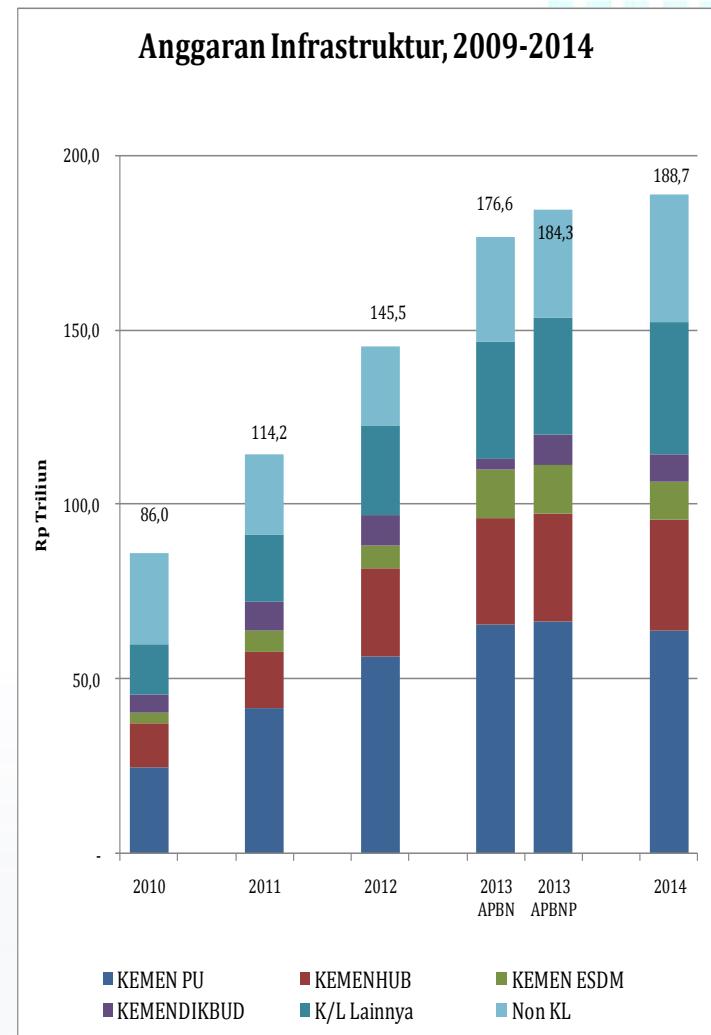




# ANGGARAN INFRASTRUKTUR 2010-2014

## (triliun Rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013		2014
	Real	Real	Real	APBN	APBNP	RAPBN*
<b>1. Kementerian Negara/Lembaga (Miliar Rupiah)</b>	<b>59,9</b>	<b>91,2</b>	<b>122,6</b>	<b>146,6</b>	<b>153,6</b>	<b>152,2</b>
033 KEMEN PU	24,9	41,8	56,5	65,6	66,7	63,7
022 KEMENHUB	12,4	16,0	25,3	30,6	30,7	31,8
020 KEMEN ESDM	3,0	6,2	6,7	13,8	13,8	10,9
023 KEMENDIKBUD	5,1	8,2	8,4	3,1	8,8	7,8
- K/L Lainnya	14,5	19,0	25,8	33,5	33,6	38,0
<b>2. Non K/L (Miliar Rupiah)</b>	<b>26,1</b>	<b>23,0</b>	<b>22,8</b>	<b>30,0</b>	<b>30,7</b>	<b>36,5</b>
a.l 1 Risiko Kenaikan Harga Tanah (land capping)	0,4	0,4	0,3	0,5	0,5	-
2 Unit Perc Pemb Prov Papua & Papua Barat	-	-	-	1,0	1,0	-
3 Pemetaan & Pemb Shelter Daerah Rawan Bencana	-	-	-	1,0	1,0	-
4 Penyelesaian pemb Perumahan Warga Baru NTT	-	-	-	0,9	0,9	-
5 Cadangan VGF	-	-	-	0,3	0,3	1,1
6 Belanja Hibah	-	-	-	3,6	2,3	3,5
7 Dana Alokasi Khusus	4,5	6,1	6,3	10,9	10,9	13,3
8 Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0	2,5
9 Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur	3,6	4,6	6,0	3,7	3,7	3,0
10 Dana Kontijensi PLN	-	-	-	0,6	0,6	1,0
11 Penyertaan Modal Negara	3,8	3,5	5,0	2,0	4,0	8,1
a.l. - PMN untuk PT Hutama Karya	-	-	-	-	2,0	5,1
12 LPDB KUKM	0,4	0,3	0,6	1,0	1,0	1,0
<b>Total</b>	<b>86,0</b>	<b>114,2</b>	<b>145,5</b>	<b>176,6</b>	<b>184,3</b>	<b>188,7</b>





# ANGGARAN SUBSIDI TAHUN 2014

## (triliun Rupiah)



Uraian	2013	2014
	APBNP	RAPBN
<b>a Subsidi Energi</b>	<b>299,8</b>	<b>284,7</b>
1) Subsidi BBM, LPG & BBN	199,9	194,9
2) Subsidi Listrik	100,0	89,8
<b>b Subsidi Non Energi</b>	<b>48,3</b>	<b>51,6</b>
1) Pangan	21,5	18,8
2) Pupuk	17,9	21,0
3) Benih	1,5	1,6
4) PSO	1,5	2,2
a) PT KAI	0,7	1,2
b) PT Pelni	0,7	0,9
c) LKBN Antara	0,1	0,1
5) Kredit Program	1,2	3,2
6) Subsidi Pajak / Pajak DTP	4,6	4,7
a) Subsidi PPh	3,9	3,7
b) Fasilitas Bea Masuk	0,8	1,0
<b>JUMLAH</b>	<b>348,1</b>	<b>336,2</b>
<b>Volume konsumsi BBM bersubsidi (juta KL)</b>	<b>48,0</b>	<b>50,5</b>



# Dukungan Fiskal Lainnya



# Skema Insentif di Sektor Industri Transportasi

## PPN dan PPnBM

- Pembebasan PPN untuk barang strategis
- Pengecualian dari pengenaan PPnBM

## Bea Masuk

- Pembebasan Bea Masuk dalam rangka penanaman modal
- Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)

## PPh

- *Investment allowance* untuk bidang usaha tertentu



# Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai

## Dasar Hukum

Pasal 16B - UU PPN

PP 12/2001 jo. PP 31/2007 -  
Impor dan atau Penyerahan  
BKP Tertentu yang Bersifat  
Strategis yang Dibebaskan dari  
Pengenaan PPN

## Bentuk Fasilitas

Pembebasan PPN atas impor  
dan/atau penyerahan **Barang  
Kena Pajak (BKP) strategis**

Termasuk dalam kriteria BKP  
strategis adalah:

Barang modal berupa mesin  
dan peralatan pabrik, baik  
dalam keadaan yang terpasang  
maupun terlepas, tidak  
termasuk suku cadang



# Perlakuan PPnBM

## Dasar Hukum

- PP 145 Tahun 2000 stdtd PP 12 Tahun 2006 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

## Ketentuan PPnBM

- Tarif PPnBM kendaraan bermotor: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 75%
- **Mobil listrik** tidak termasuk dalam kelompok barang yang dikenai PPnBM



# Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penanaman Modal (1)

## Dasar Hukum

PMK  
176/PMK.011/2009  
jo 76/PMK.011/2012  
tentang Pembebasan  
Bea Masuk Atas  
Impor Mesin Serta  
Barang Dan Bahan  
Untuk Pembangunan  
Atau Pengembangan  
Industri Dalam  
Rangka Penanaman  
Modal

## Subjek

Industri yang  
menghasilkan barang  
  
Industri yang  
menghasilkan jasa  
(Pariwisata dan  
Kebudayaan,  
Transportasi/  
Perhubungan,  
Pelayanan Kesehatan  
Publik,  
Pertambangan,  
Konstruksi, Industri  
Telekomunikasi, dan  
Kepelabuhanan)

## Objek

Mesin yang  
digunakan untuk  
pembangunan atau  
pengembangan  
industri  
  
Barang dan Bahan  
yang digunakan  
sebagai bahan atau  
komponen untuk  
menghasilkan barang  
jadi.



# Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penanaman Modal (2)

## Pembebasan Bea Masuk Mesin

- Sesuai jangka waktu Pembangunan/ Pengembangan (sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal/ SPPM BKPM)

## Pembebasan Bea Masuk Barang dan Bahan

- Pembangunan dan Pengembangan: sejumlah untuk keperluan produksi selama 2 tahun dalam jangka waktu impor 3 tahun
- TKDN 30%: sejumlah untuk keperluan produksi selama 4 tahun dalam jangka waktu impor 4 tahun



# Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Industri Otomotif dan Kendaraan Angkutan Masal 2013



Kuasa Pengguna Anggaran	PMK	Sektor Industri	Pagu Yang Disetujui (Rp)
Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kemenperin	52/PMK.011/2013	Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	300,000,000,000.00
	53/PMK.011/2013	Pembuatan dan Perbaikan Gerbong Barang, Kereta Penumpang, Kereta Rel Listrik/Diesel, <i>Bogie</i> dan Komponen Kereta Api	7,500,000,000.00
	57/PMK.011/2013	Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal	60,800,000,000.00



# Insentif Pajak Penghasilan

## Dasar Hukum

PP 52 Tahun 2011

## Subjek

Wajib Pajak badan dalam negeri

Berbentuk perseroan terbatas atau koperasi

Melakukan penanaman modal pada bidang usaha atau daerah yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional

## Jenis Insentif

Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal

Penyusutan dan amortisasi dipercepat

Pengurangan tarif PPh atas dividen luar negeri

Perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian dari 5 tahun menjadi paling lama 10 tahun



# Industri Komponen dalam PP 52/2011

Bidang Industri	KBLI	Cakupan Produk	Syarat
Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29300	<ul style="list-style-type: none"><li>• Engine dan engine part (keseluruhan engine secara utuh termasuk komponennya antara lain: karburator dan bagiannya, cylinder block, cylinder liner, cylinder head, dan head cover, piston, ring piston dan crank case, crank shaft, connecting rod dan lain-lain)</li><li>• Brake system, axle &amp; propeller sharft, transmission/clutch system steering system</li><li>• Injector, water pump, oil pump, fuel pump</li><li>• Forging component, die casting component, stamping part</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Investasi &gt; Rp. 100 M</li><li>• Tenaga kerja &gt; 100 orang</li></ul>



# Masukan

- Insentif perpajakan bukan merupakan satu-satunya penentu investasi
- *Research and development* merupakan salah satu hal strategis, sehingga perlu mendapat perhatian untuk dilakukan di Indonesia

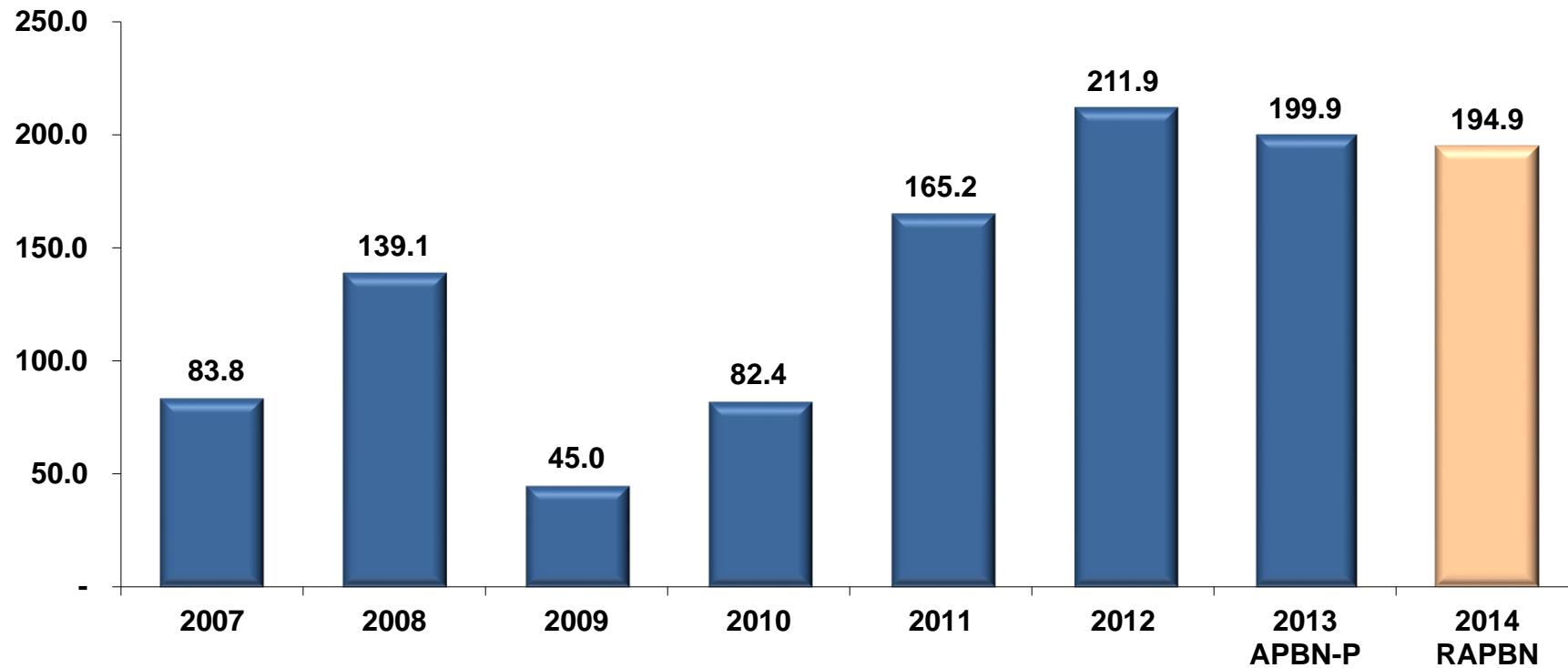


# Tantangan Transportasi Publik



# Perkembangan Anggaran Subsidi BBM

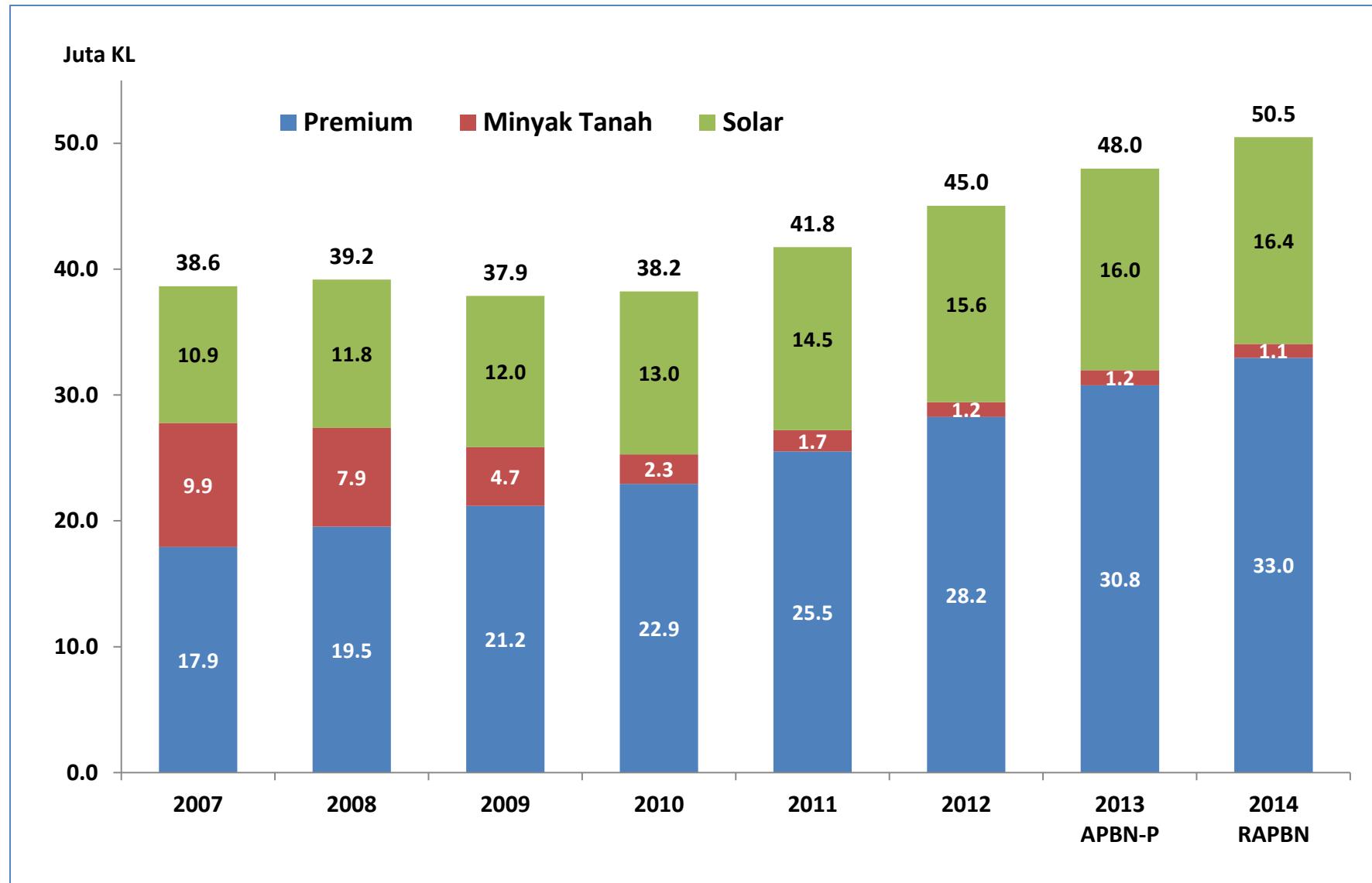
Triliun Rp



- Beban subsidi BBM yang masih besar mengurangi diskresi Pemerintah untuk melakukan pengembangan transportasi ramah lingkungan;



# Konsumsi BBM Bersubsidi





# Kebijakan Subsidi BBM 2014

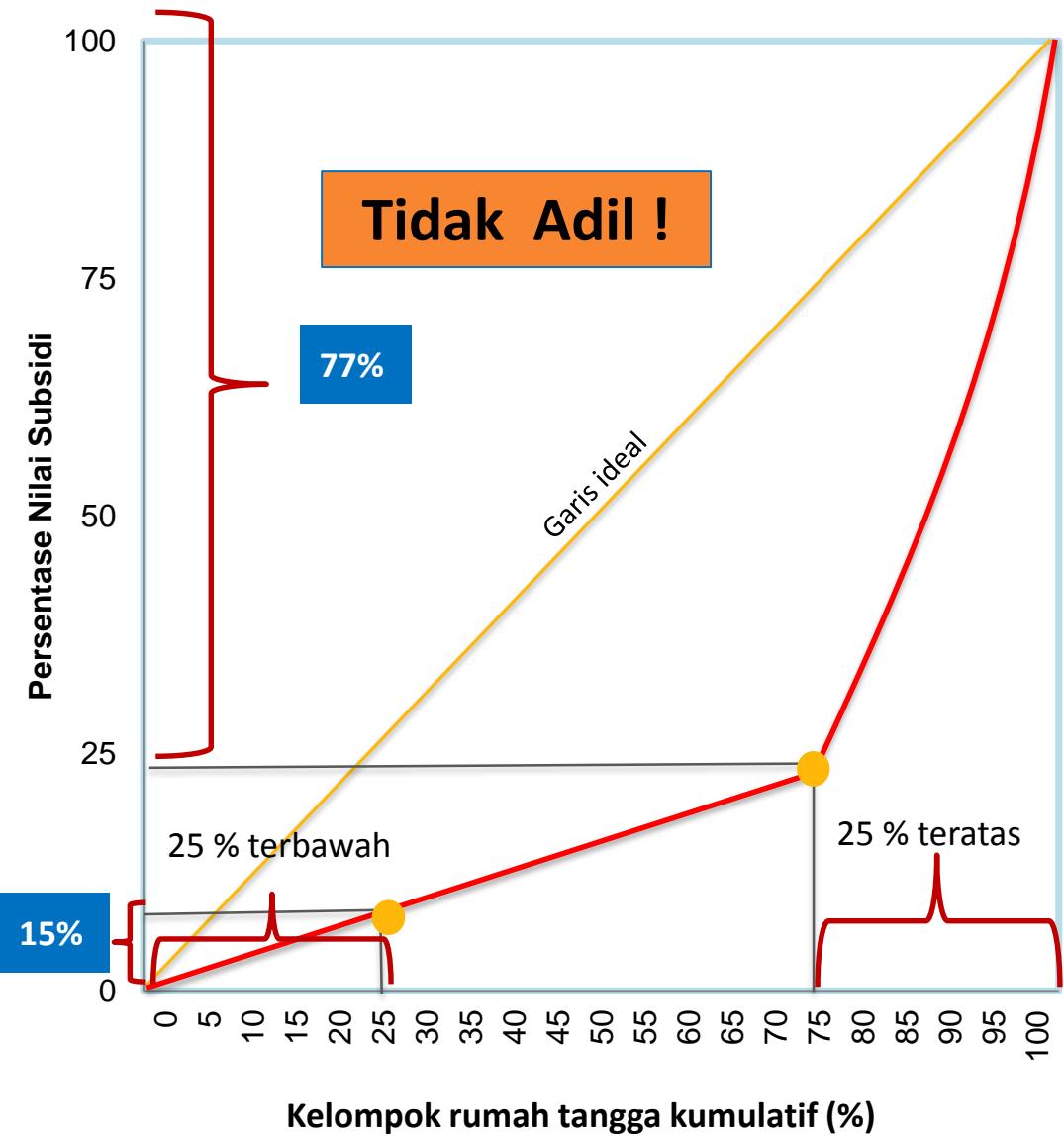
1. Meningkatkan efisiensi anggaran subsidi BBM dan ketepatan target sasaran
2. Melanjutkan program konversi BBM ke BBG;
3. Melanjutkan program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 Kg;
4. Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota;
5. Meningkatkan pengawasan dan penyaluran konsumi BBM bersubsidi;
6. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya pengendalian BBM bersubsidi;
7. Mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan antara lain melalui konversi BBN dan gas; dan
8. Meningkatkan pengawasan Pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi.



# Perlu Perbaikan Efektivitas Subsidi



# Subsidi BBM tidak tepat sasaran....



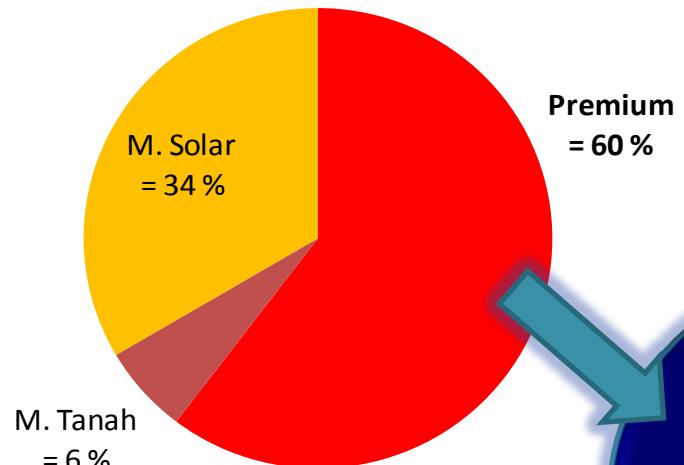
- Kelompok 25% rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan **tertinggi** menerima alokasi subsidi sebesar 77%.
- Kelompok 25% rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan **terendah** hanya menerima subsidi sekitar 15%.
- **Terjadi ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi BBM.**



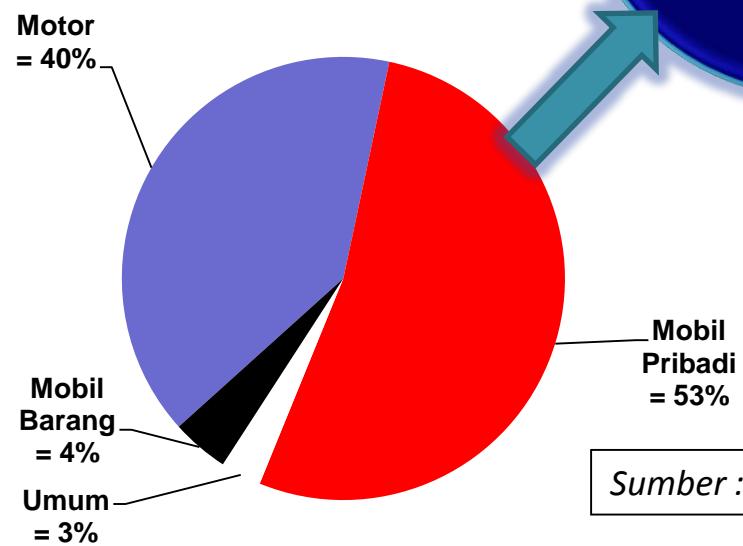
# Konsumsi BBM Bersubsidi tidak tepat sasaran dilihat dari sisi konsumen pengguna dan sisi kewilayahan....



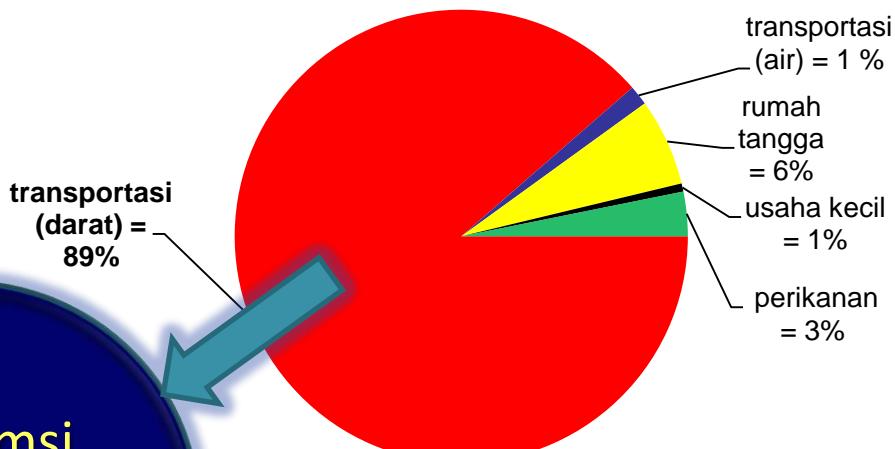
Per Jenis BBM Bersubsidi



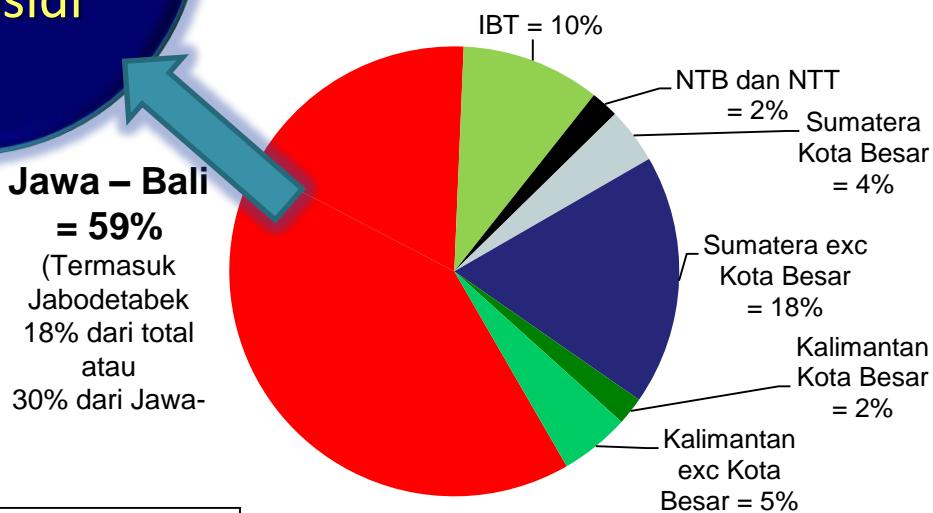
Konsumsi Premium  
Sektor Transportasi Darat



Per Sektor Pengguna



Konsumsi Premium Per Wilayah



Sumber : Kementerian ESDM



# TERIMA KASIH

